

ISLAM, PANCASILA DAN KONSTITUSIONALISME

Pembaca Jurnal yang Baik,

Jurnal Tashwirul Afkar edisi kali ini ingin *merefresh* kembali bagaimana proses penerimaan Pancasila sebagai dasar negara dalam bingkai konstitusionalisme negeri ini. Bagaimana peran NU (Nahdlatul Ulama) bersama para tokohnya memberikan argumen penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan penerimaan Pancasila itu sendiri disebut sebagai Islami dan syar'i yang tidak perlu diragukan kembali. Lima sila yang terkandung dalam Pancasila adalah prinsip yang sama dalam perjuangan Islam. Ini tidak terlepas dari perbincangan yang hangat kembali di berbagai kalangan masyarakat, terlebih setelah menguatnya politik Islam dan Islam politik yang berbau sektarian dan nirtolerans.

Mulai dari rubrik Tashwir yang membingkai penegasan penerimaan Pancasila dari berbagai kalangan dan latar belakang. Para tokoh negeri yang membangun kesepakatan bersama sejak perumusan awal dasar negara dan pondasi konstitusi bagi negara kepulauan yang multikultur. Ini semua dilakukan dalam

rangka menguatkan kebhinnekaan negeri dari Sabang sampai Merauke.

Dalam riset redaksi Ahmad Suaedy mengawali dengan pertanyaan apakah benar nasionalisme (*nationalism*) dan negara-bangsa (*nation-state*) yang menjadi dasar bagi kesetaraan warganegara atau kewarganegaraan yang dibangun dari asumsi optimisme kapitalistik dengan dunia yang menyatu, egaliter dan datar di bawah kapitalisme global telah merealisasikan janji-janjinya? Seringkali kesetaraan yang dibangun sebagai *imagine communities* Ben Anderson sejatinya hanya untuk mereka yang terliput di dalam arus media modern, namun sembari menutup mata bagi nasib mereka yang tersingkir dan marjinal. Lantas bagaimana bangsa dan negara Indonesia yang diikat oleh Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika memiliki dinamikanya sendiri, searah dengan perubahan masyarakat yang meliputi berbagai aspek, ekonomi, sosial, politik serta kebudayaan. Dalam tulisannya, Ahmad Suaedy mencoba menelusuri konsep dan praksis kewarganegaraan dalam dinamika perjalanan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika tersebut di mana NU menjadi salah satu eksponen

penting.

Rubrik artikel utama juga banyak yang mengulik Pancasila, mulai dari tulisan Saiful Arif yang mengulik perdebatan Islam dikaitkan dengan Pancasila dan Keindonesiaan, berikutnya Asep Solahuddin yang juga menguatkan pandangan Pancasila, tidak hanya menjadi *way of live*, falsafah, ideologi, namun lebih jauh harus menjadi jalan kebudayaan. Dilanjutkan tulisan Kang Asep Salahudin yang memiliki spirit yang sama terkait Pancasila sebagai *way of life*.

Berikutnya Abdul Mun'in DZ ingin mengajak pembaca untuk menyelami Pancasila dalam konteks kekinian. Pemahaman baru yang barangkali belum dirumuskan oleh para perumus maupun para penafsir Pancasila di masa lalu, sehingga diharapkan mampu menjawab makna dan relevansi Pancasila di era global sekarang ini. Kesenjangan ekonomi, keadilan sosial, kriminalistik yang tinggi membuat banyak pihak frustrasi. Kelompok Islam puritan dan kalangan ekonomi kaya yang cenderung neokolonialisme sama-sama berebut panggung penafsiran Pancasila dan memanfaatkan frustrasi masyarakat dengan 'mimpi-mimpi' yang membuat semakin rumit, gaduh dan intoleran.

Yana Priyatna juga ingin melihat kembali perdebatan para pendiri Republik dalam merumuskan awal Pancasila hingga periode krusial perdebatan di konstituante hingga memunculkan pandangan kalangan marhaenisme, komunisme, islamisme,

dan pandangan Aswaja an-Nahdliyah. Tulisan Riri Kharirah yang melengkapi tema Pancasila dalam pandangan para peneliti dan pemerhati Asing. Terakhir tulisan Wahyudi Akmaliah yang membahas Pancasila pasca Orde Baru yang relatif terabaikan hingga muncul diskursus bagaimana menempatkan Pancasila dalam wacana sekularisasi, nasionalisme religius, dan nasionalisme berketuhanan.

Selanjutnya, Afkar edisi ini juga mempunyai tambahan artikel lepas, mulai dari tulisan Teuku Kemal Pasya yang menyampaikan tulisan menarik seputar Aceh pasca Pilkada 2017 yang diikuti banyak pasangan dan dimenangkan Irwandi, hingga perbincangan populisme dan harapan demokrasi baru bagi masa depan Aceh. Kami juga hadirkan hasil wawancara Afkar dengan salah satu Deputy Unit Kerja Presiden yang baru dalam bidang Pembinaan Ideologi Pancasila, DR. Anas Saidi, MA. Terakhir kami lengkapi dengan ulasan buku yang ditulis oleh Suraji yang mereview dua buku yang bertema Pancasila, yakni kajian pemikiran KH. Achmad Siddiq, mantan Rais Am PBNU yang menegaskan dukungan pada Pancasila dan pemikiran ekonomi Pancasila Prof. Mubyarto.

Selamat menyelami edisi Jurnal Tashwurul Afkar kali ini, semoga banyak menemukan inspirasi dan selanjutnya melahirkan karya yang bisa dikirim dan dimuat di jurnal yang kita sayangi ini.